

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PUSAT KESEHATAN HEWAN GAMPING

INTISARI

Oleh

Haryo Wibowo Damar Hanindha¹, R. A. Antari Innaka Turingsih²

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana bentuk pelindungan hukum terhadap pengguna jasa Pusat Kesehatan Hewan Gamping yang digunakan beserta menganalisis dan mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jasa antara dokter hewan di Pusat Kesehatan Hewan Gamping dengan konsumen (pengguna jasa).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara kepada narasumber dan reponden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak pengguna jasa dilindungi oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang baik secara preventif maupun represif, namun hak konsumen yang diatur dalam UUPK, dengan posisi Puskesmas Gamping sebagai bentuk perpanjangan tangan dari Pemerintah namun juga sebagai penyedia jasa, sedangkan tidak semua penyedia jasa merupakan pelaku usaha, maka pelindungan hukum yang dimiliki pengguna jasa sebagai konsumen dalam UUPK kurang kuat. Mengenai perjanjian melakukan jasa yang telah diadakan antara konsumen dengan dokter hewan yang mewakili Puskesmas Gamping adalah sah dan mengikat para pihak.

Kata Kunci : *Pelindungan Hukum, Keabsahan Perjanjian, Pusat Kesehatan Hewan.*

¹ Mahasiswa Strata Satu (S1), Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

LEGAL PROTECTION FOR USERS OF GAMPING ANIMAL HEALTH CENTER SERVICES

ABSTRACT

By :

Haryo Wibowo Damar Hanindha¹, R. A. Antari Innaka Turingsih²

This legal research aims to analyze and understand the legal protection provided to users of Gamping Animal Health Center services, as well as to analyze and determine the validity of service agreements between veterinarians at Gamping Animal Health Center and consumers (service users).

This research was conducted using normative-empirical research methods. Normative research was conducted to obtain secondary data by examining library materials. Empirical research was conducted to obtain primary data through interviews with informants and respondents. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis methods to get answers to the problems studied.

The results of this research show that the rights of service users are protected by Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation, both preventively and repressively. However, consumer rights regulated under the Consumer Protection Law (UUPK) may have weaker legal protection for service users as consumers within UUPK due to Gamping Animal Health Center's position as an extension of the government's hand while also acting as a service provider, where not all service providers are business actors. Regarding service agreements between consumers and veterinarians representing Gamping Animal Health Center, such agreements are considered valid and binding for all parties involved.

KeyWords : Legal Protection, Validity of Agreement, Animal Health Center.

¹ Undergraduate Student of Civil Law Department in Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecture, Private Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.